

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai upaya mempertahankan hak dunia pekerjaan yang berkaitan dengan faktor pertumbuhan penduduk suatu negara karena angkatan kerja, jumlah penduduk dan kesempatan kerja berdampak pada tingkat pengangguran. Strategi pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran ialah dengan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Seiring dengan perkembangan ekonomi di negara maju menyediakan lapangan kerja yang luas bagi para tenaga kerja dari berbagai negara yang belum ataupun sedang berkembang. Hal ini, tentunya mendorong tenaga kerja dari berbagai negara untuk mencari pekerjaan di negara yang lebih maju dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.<sup>1</sup>

Perdagangan manusia di Kamboja, khususnya TKI, terjadi pada Juli 2022 dengan jumlah korban sebanyak 202 orang, terdiri dari 189 laki-laki dan 13 perempuan. Respons pemerintah terhadap kasus ini adalah dengan mengembalikan 202 korban tersebut melalui Kementerian Luar Negeri.

Modus kasus ini dilakukan melalui media sosial. Kebanyakan orang ditawarkan pekerjaan di layanan pelanggan dengan bayaran \$1.000-\$1.200 per

---

<sup>1</sup> Reynold E. P. Hutagalung, Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian, (Depok: LKPS, 2019) Hlm.1

bulan, atau sekitar Rp. 14,7 juta-Rp. 17,6 juta, tanpa memerlukan kualifikasi khusus.<sup>2</sup>

Kemudian mereka melakukan perjalanan ke negara tujuan tanpa memperoleh visa kerja dari kedutaan negara terkait di Jakarta. Namun, sebagai sesama anggota ASEAN, Anda bisa menikmati fasilitas bebas visa untuk kunjungan wisatawan. Selain itu, ada juga yang bepergian dengan biaya sendiri atau mendapat kompensasi dari perekrut. Pemerintah Indonesia juga mengimbau WNI untuk berhati-hati saat ditawarkan pekerjaan di Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, atau Filipina.

Pemerintah Indonesia juga mengimbau WNI untuk mewaspadaikan tawaran pekerjaan di media sosial yang bergaji tinggi namun tidak memiliki persyaratan atau visa kerja tertentu. Selain itu, masih ada WNI yang memaksakan diri meski sadar akan bahayanya.

Bekerja sama dengan Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh berhasil membebaskan 34 WNI yang mengaku disandera di perusahaan penipuan *online* di Kamboja. Mayoritas penduduk Indonesia berasal dari Sulawesi Utara. Sebelumnya, pada 8 Desember 2022, seorang WNI yang mewakili 34 TKI mengajukan pengaduan ke KBRI Phnom Penh.

Penggunaan internet untuk tujuan bisnis atau perdagangan disebut sebagai penipuan *online* atau penipuan *online* dalam *e-commerce*. Pekerjaan ini sangat berbeda dengan apa yang dijanjikan sebelumnya, yakni bekerja sebagai penjual

---

<sup>2</sup> VOA Indonesia.com, "WNI Korban Tipuan Online Di Kamboja Telah Dipulangkan Ke Indonesia", <https://www.voaindonesia.com/a/wni-korban-tipuan-online-di-kamboja-telah-dipulangkan-ke-indonesia-/7080250.html>, diakses pada 18 September 2023.

investasi bagi masyarakat Indonesia. PMI yang tiba di Kamboja menghadapi situasi sulit karena harus membayar denda jika mengundurkan diri atau berhenti. PMI juga dijanjikan untuk bek

Kerja di negara lain dalam beberapa kasus, namun malah dikirim ke Kamboja atau lokasi kasino online lainnya dalam jaringan yang sama. Terkadang juga para PMI PMI dijual ke perusahaan Tiongkok lainnya. Jam kerja yang berlebihan (hingga lebih dari 12 jam per hari) dan larangan memegang dokumen/paspor merupakan salah satu pengaduan yang disampaikan PMI ke KBRI Phnom Penh. Bahkan, di beberapa kasus, perusahaan resmi menyalurkan PMI dengan biaya Rp50-65 juta per orang.

Analisis terhadap upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, khususnya pekerja perempuan di Kamboja. Berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia yang dituangkan dalam Pasal 14 Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak atau Konvensi Asean Lagi. Berdasarkan Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Konvensi, kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dibebankan baik kepada negara yang menampung korban tindak pidana maupun negara penerima pemulangan korban tindak pidana, dalam hal ini negara penerima pemulangan korban tindak pidana. pemerintah Kamboja dan Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Eka Aqimuddin Dhea Shabrina 'Ishmah and Fariz Farrih Izadi, "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di Kamboja Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," Universitas Islam Bandung, 2023, 17-20, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3287388>. Hal.19-20

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka pemerintah Kamboja dan Indonesia telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana. Hal ini ditunjukkan oleh pemerintah Kamboja yang memperbolehkan WNI korban untuk tetap tinggal sementara di negara Kamboja hingga proses repatriasi selesai terhadap para korban. Sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 14 ayat 4 Konvensi, yang mengharuskan negara-negara pihak untuk membuat undang-undang yang mengizinkan korban tindak pidana perdagangan manusia untuk tinggal di negara mereka selama waktu yang terbatas.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mewajibkan Perwakilan Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam bahaya. Kolaborasi, seperti dengan Pemerintah daerah atau negara lain, dapat membantu implementasi. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) baru-baru ini membagikan informasi tentang perlindungan WNI yang menjadi korban penipuan di Kamboja.

Pemerintah Kamboja dan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum, namun tidak pernah diungkapkan oleh pemberitaan atau media, hanya daerah asalnya saja, dan hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 14 ayat 6 konvensi tentang kewajiban negara pihak kepada korban untuk melindungi identitas korban berupa kerahasiaan identitas korban tindak pidana.

Kemudian, sejak Januari 2021 hingga September 2022, Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), 934 warga negara Indonesia (WNI)

menjadi korban perusahaan penipuan online. Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, terjadi peningkatan penipuan dalam setahun terakhir. Untuk lebih jelasnya, penipuan perusahaan penipuan online merupakan penipuan rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Para korban dipekerjakan di luar jalur resmi dan rentan terhadap eksploitasi.

Pada tanggal 9 Desember 2022, KBRI Phnom Penh berkoordinasi dengan otoritas setempat, dan seluruh WNI yang berjumlah 34 berhasil diselamatkan oleh otoritas Kamboja. Melalui informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, ke-34 WNI tersebut saat ini sedang diperiksa oleh Polres Phnom Penh. Proses ini diperkirakan memakan waktu seminggu sebelum mereka diserahkan ke KBRI Phnom Penh untuk dipulangkan. Jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perusahaan penipuan online di Kamboja terus bertambah. 679 WNI berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke Indonesia antara tahun 2020 hingga Oktober 2022.<sup>4</sup>

Menurut Kementerian Luar Negeri RI, langkah tegas di hulu harus diambil oleh pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk pemerintah daerah. Pencegahan tersebut antara lain dengan memastikan pekerja migran berangkat sesuai prosedur dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai cara-cara curang bekerja di luar negeri melalui jaringan media sosial.

---

<sup>4</sup> Kompas.com., "34 WNI Korban Penipuan Kerja di Kamboja Berhasil Dibebaskan, Mayoritas dari Sulawesi Utara", <https://www.kompas.com/global/read/2022/12/11/190000570/34-wni-korban-penipuan-kerja-di-kamboja-berhasil-dibebaskan-mayoritas>, diakses pada 11 Oktober 2023.

Melansir laman Kompas.com, Kementerian Luar Negeri berhasil memproses 934 WNI yang tersebar di beberapa negara ASEAN, antara lain Kamboja, Myanmar, dan Laos. Kamboja mempunyai jumlah korban terbanyak, dengan 639 orang Indonesia di antaranya. Myanmar memiliki 142 WNI, Filipina 97, Laos 35, dan Thailand 21 WNI.

Tabel 1.1. Data Korban WNI yang berada di negara ASEAN<sup>5</sup>

| No | Negara   | Korban WNI |
|----|----------|------------|
| 1. | Kamboja  | 639 WNI    |
| 2. | Myanmar  | 142 WNI    |
| 3. | Filipina | 97 WNI     |
| 4. | Laos     | 35 WNI     |
| 5. | Thailand | 21 WNI     |

Sumber: Kementerian Luar Negeri melalui Media Kompas, 2022

Kementerian Luar Negeri juga melihat adanya peningkatan signifikan jumlah WNI/PMI yang bekerja di Kamboja dan negara lain secara non-prosedural. Kemudian, dari 639 WNI yang diselamatkan di Kamboja dari penipuan *online*, 442 orang berhasil dirawat dan dipulangkan ke negara asalnya. Sedangkan 166 orang lainnya masih dirawat.

Saat ini, sebanyak 166 orang ditahan dan ditahan di rumah persembunyian yang disediakan KBRI Phnom Penh. Selain itu, 31 orang lainnya sedang

<sup>5</sup> Kompas.com, "Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN", <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/19324601/kemenlu-934-wni-jadi-korban-penipuan-perusahaan-online-scam-di-kawasan-asean>, diakses pada 11 Oktober 2023

berkoordinasi dengan aparat keamanan dan polisi Kamboja untuk menyelesaikan insiden tersebut secepatnya.

Upaya efektif yang dilakukan Pemerintah dalam penyelamatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Kamboja, membuktikan bahwa negara masih hidup dan sejahtera, meskipun ada upaya dari berbagai individu dan organisasi yang bertugas melaksanakan WNI. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kamboja menyelamatkan 62 PMI yang ditawan di Kamboja setelah ditipu soal peluang kerja.

Pekerjaan palsu ini hadir dengan janji gaji 1000-1500 dollar atau 15-22 juta rupiah jika dirupiahkan. Setelah PMI pergi, mereka bekerja di sebuah perusahaan di Kamboja, bukan sebagai pemasar, melainkan sebagai operator investasi palsu dan curang. Selain itu, PMI tidak dibayar sesuai tawaran mereka, dipekerjakan tanpa memperhatikan jam kerja atau bekerja terlalu keras, dan paspor pekerja migran ditahan oleh agen di Phnom Penh.<sup>6</sup>

Para pemimpin ASEAN harus membahas teknis implementasi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Orang yang Disebabkan Penyalahgunaan Teknologi secepatnya agar dapat diterapkan oleh masing-masing negara dan kita semua dapat bekerja sama untuk mencegah semakin banyaknya korban TPPO.

Menurut Laporan Perdagangan Manusia Pemerintah AS, warga negara Indonesia telah menjadi korban penipuan *online* di Kamboja. Menurut laporan

---

<sup>6</sup> KSP.go.id, "Penyelamatan di WNI di Kamboja Bukti Negara Serious Perangi Perbudakan modern", <https://www.ksp.go.id/penyelamatan-wni-di-kamboja-bukti-negara-serius-perangi-perbudakan-modern.html>, diakses pada 17 September 2023, pukul 21:04 WIB

tersebut, pemerintah Indonesia hanya melakukan sedikit perbaikan, seperti kurangnya SOP untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia di Kamboja dan kegagalan menyelesaikan MOU antara Indonesia dan Kamboja mengenai kerja sama penegakan hukum.<sup>7</sup>

Adanya sindikat internasional antar negara ASEAN, serta adanya korban TPPO dari negara-negara ASEAN, memerlukan peningkatan kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan luar biasa tersebut. Hanya satu atau beberapa negara yang dapat mengambil tindakan hukum dan pencegahan. Kami berharap kesepakatan ini segera ditindaklanjuti dengan dokumen implementasi yang efektif untuk diterapkan oleh negara-negara ASEAN, baik dalam bentuk SOP maupun MoU antar negara.

Memang benar jumlah kasus perusahaan penipuan online yang melibatkan warga negara Indonesia sebagai korban semakin meningkat di Kamboja. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sebanyak 679 WNI berhasil diselamatkan dan dipulangkan sepanjang tahun 2020 hingga Oktober 2022. Namun, kasus serupa berulang kali muncul. Pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk pemerintah daerah, harus mengambil tindakan pencegahan yang tegas sejak awal. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain adalah memastikan pekerja migran berangkat sesuai dengan seluruh persyaratan prosedur. Selain itu, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia

---

<sup>7</sup> SBMI, "WNI di Kamboja Diduga Menjadi Korban Perdagangan Orang", <https://sbmi.or.id/11-wni-di-kamboja-diduga-menjadi-korban-perdagangan-orang-sbmi-pertanyakan-komitmen-asean/>, diakses pada 18 September 2023



tentang metode penipuan bekerja di luar negeri yang beredar di jaringan media sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik mengkaji mengenai **“Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Warga Negara Indonesia Dalam Kasus Penipuan Online Scam di Kamboja”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis menentukan satu rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia terhadap perlindungan pada kasus *online scam* ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hukum di Indonesia terhadap perlindungan pada kasus *online scam*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dalam ilmu hukum nasional dan hukum internasional terkait kasus *online scam*.

## 2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dengan menyusun peraturan tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia WNI dalam Kasus Penipuan *Online Scam* di Kamboja.
2. Bagi Akademisi, diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai landasan pemikiran tentang pentingnya tindakan Pemerintah dalam menangani Kasus Penipuan *Online Scam* di Kamboja.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat membantu dalam memberikan rekomendasi atau rujukan untuk menyelesaikan permasalahan, serta memberikan informasi mengenai hak-hak hukum dan hak-hak warga negara Indonesia dalam hal belanja *online* di Kamboja.
4. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perlindungan hukum dan hak asasi warga negara Indonesia dalam kasus penipuan *online scam* di Kamboja.